

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa konsekuensi terhadap penataan organisasi, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, serta perubahan mengenai urusan–urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tersebut tentunya harus disertai dengan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang proporsional, efisiensi, efektifitas dan terukur, yang bermuara pada terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai wujud pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategis pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ditugaskan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Mengingat tantangan yang dihadapi kedepan akan semakin berat dan kompleks, diperlukan interkoneksi peran dan fungsi ketiga unsur (domain) tersebut dalam konsepsi manajemen strategik dan infleentasinya berdasarkan prinsip-prinsip; akuntabilitas, tranparansi, keterbukaan, aturan hukum, keadilan dan partisipasi, Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus segera direspon secara proaktif melalui penerapan manajemen perubahan yang visioener dan pembelajaran kolektif terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu system akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas

dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah, Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, dibuat sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka kedudukan Biro Bina Mental dan Spritual adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Biro (Eselon II B) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat dibantu Kepala Bagian 4 (empat) orang (eselon III A).

Tugas pokok Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2012 yaitu : mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring serta evaluasi penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan di bidang lembaga keagamaan, sarana keagamaan,

mental, seni, budaya serta urusan haji pengelolaan, zakat dan evaluasi program mental spiritual.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Biro Bina Mental dan Spritual mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian dan pembinaan di bidang lembaga keagamaan, sarana keagamaan, mental, seni, budaya serta urusan haji, pengelolaan zakat dan evaluasi program mental spiritual;
- b. Menyelaraskan perumusan kebijakan di bidang lembaga keagamaan, sarana keagamaan, mental, seni, budaya serta urusan haji, pengelolaan zakat, dan evaluasi program mental spiritual;
- c. Pengembangan dan fasilitasi di bidang lembaga keagamaan, sarana keagamaan, mental, seni, budaya serta urusan haji, pengelolaan zakat, dan evaluasi program mental spiritual;
- d. Penyiapan dan pengelolaan data dan informasi di bidang lembaga keagamaan, sarana keagamaan, mental, seni, budaya serta urusan haji, pengelolaan zakat, dan evaluasi program mental spiritual;
- e. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 137.

Untuk Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Biro Bina mental dan Spiritual sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keagamaan, sarana keagamaan, mental, seni, budaya serta urusan haji, pengelolaan zakat, dan evaluasi program mental spiritual;
- g. Menyelenggarakan koordinasi lintas departemen, bupati dan walikota serta instansi terkait di bidang lembaga keagamaan, sarana keagamaan, mental, seni, budaya serta urusan haji, pengelolaan zakat, dan evaluasi program mental spiritual;
- h. Memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang menyangkut bidang lembaga keagamaan, sarana keagamaan, mental, seni, budaya serta urusan haji, pengelolaan zakat, dan evaluasi program mental spiritual;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan manajemen keuangan secara efektif dan efisien;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Biro Bina mental dan Spiritual sebagai bahan perumusan.

- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Bina Mental dan Spritual mempunyai fungsi

- a) Menyiapkan dan mengkoordinir pedoman pembinaan dan petunjuk teknis bidang sarana keagamaan;
- b) Menyiapkan dan mengkoordinir pedoman pembinaan dan petunjuk teknis bidang Mental, Seni dan Budaya;
- c) Menyiapkan dan mengkoordinir pedoman pembinaan dan petunjuk teknis bidang Haji dan Zakat .

C. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Dinamika lingkungan strategis yang berlangsung sangat cepat merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Faktor perubahan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi dinamika pembangunan, sehingga diperlukan respon positif dan antisipatif untuk melakukan penyesuaian diberbagai sektor pembangunan terutama dengan telah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Lingkungan strategi yang berpengaruh bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan strategis internal yang berpengaruh terhadap

pencapaian Misi Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 4 (empat) unsur yaitu :

- a. Sumberdaya Aparatur
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Keuangan dan
- d. Kelembagaan.

Lingkungan strategis internal yang berpengaruh terhadap pencapaian Misi Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

a. **Sumberdaya Aparatur**

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia, yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.

Sumberdaya Aparatur yang dimiliki Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir Desember 2015 sebanyak 37 orang dan dapat dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
**KLASIFIKASI PENDIDIKAN PEGAWAI BIRO BINA MENTAL DAN SPIRITUAL
 SEKRETARIAT DAERAH PROV, SULSEL**

NO	TAHUN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1.	2011	S2	7
		S1	20
		D III	3
		SMA	4
		SMP	1
2.	2012	S2	8
		S1	21
		D III	4
		SMA	1
		SMP	1
3.	2013	S2	8
		S1	20
		D III	3
		SMA	1
		SMP	1
4.	2014	S2	12
		S1	16
		D III	3
		SMA	2
		SMP	1
5.	2015	S2	11
		S1	20
		D III	3
		SMA	2
		SMP	1

Tabel 1.2
**YANG MENGIKUTI LATPIM PEGAWAI BIRO BINA MENTAL DAN SPIRITUAL
 SEKRETARIAT DAERAH PROV, SULSEL**

NO	URAIAN	JUMLAH (orang)
1.	Latpim III	4
2.	Latpim IV	11

Tabel 1.3
 KLASIFIKASI GOL/RUANG PEGAWAI TAHUN 2015
 BIRO BINA MENTAL DAN SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH PROV, SULSEL

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina TK I, IV/b	1
3.	Pembina, IV/a	6
4.	Penata Tk I, III/d	9
5.	Panata, III/c	4
6.	Penata Muda Tk, I . III/b	10
7.	Penata Muda, III/a	0
8.	Pengatur TK I, II/d	3
9.	Pengatur, II/c	0
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1
11.	Pengatur Muda, II/a	1
12.	Juru, I/c	1
	J u m l a h	37

Dalam lingkup Biro Bina Mental dan Spritual telah didukung oleh sumber daya aparatur (PNS) sebanyak 37 orang, terdiri dari 15 orang laki - laki dan 22 orang Wanita.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dari segi kualitas yakni dengan menggunakan tolak ukur pendidikan formal dan dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menagani tugasnya, sudah mencukupi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional pada Biro Bina Mental dan Spiritual, sebagai berikut :

- a) Kendaraan Dinas sebanyak 4 (empat) unit mobil dan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 (dua);
- b) Gedung perkantoran yang cukup memadai yaitu lantai 4 (empat) Gedung C kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
- c) Peralatan Komputer PC 13 (tiga belas) buah namun dalam kondisi baik sebanyak 6 (enam) buah, mesin ketik 4 (empat) buah 2 (dua) diantaranya masih dapat digunakan , note book 13 (tiga belas) buah dan masih dapat digunakan dalam kondisi baik hanya 11 (sebelas) buah.
- d) Sarana komunikasi kantor, Telepon 1 (satu) buah, serta PABX sebanyak 6 (enam) buah.

c. **Sumberdaya Keuangan**

Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan dana/anggaran. Tahun 2015 Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mendapatkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui anggaran belanja langsung sebanyak Rp. 6.542.258.211,- (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.4
Jumlah APBD Biro Mensprit Tahun 2011 – 2015

TAHUN	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (Rp)
2011	6.899.807.500,-
2012	10.075.000.000,-
2013	5.832.775.000,-
2014	7.970.000.000,-
2015	6.542.258.211,-

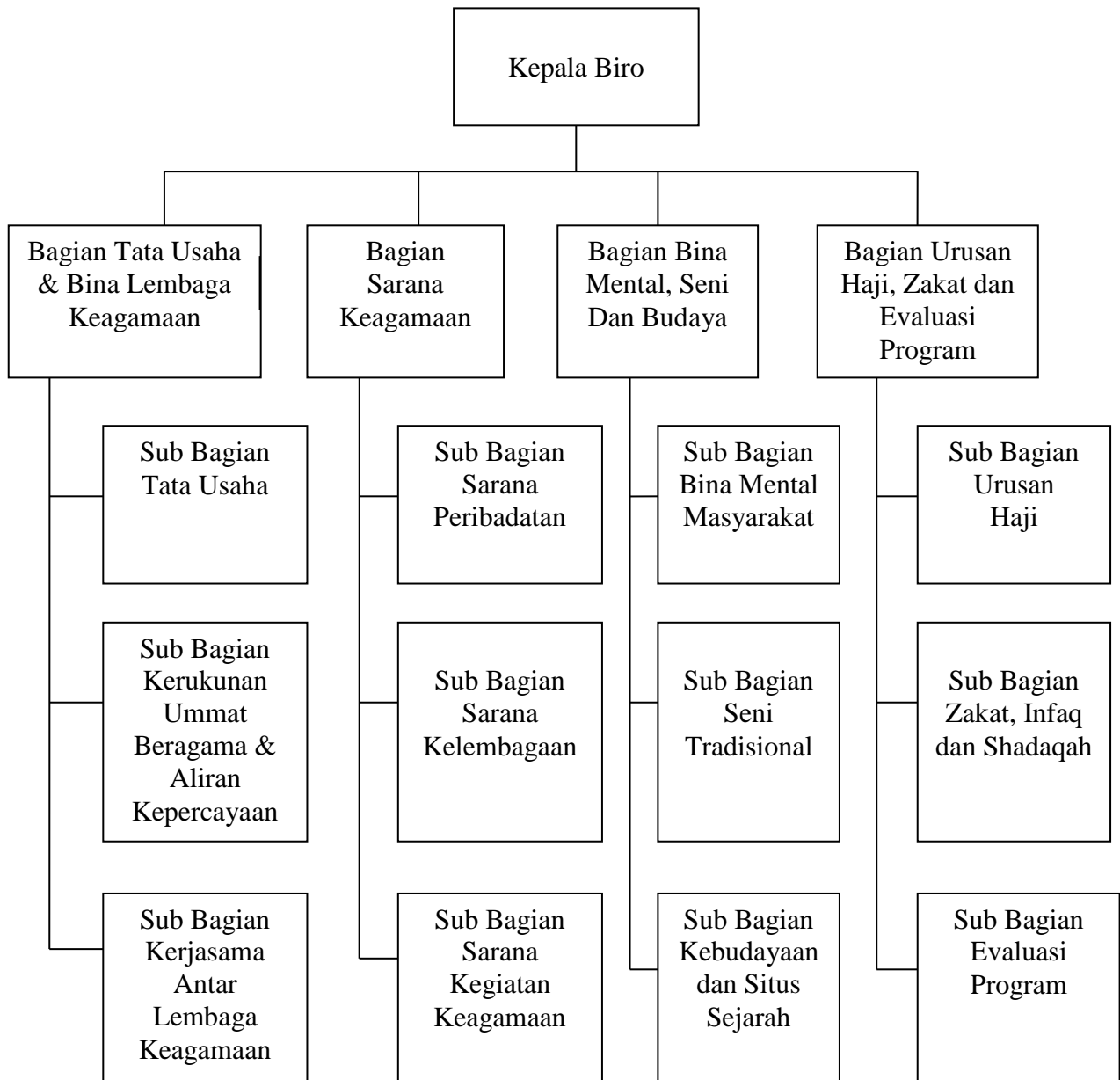
Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 6.542.258.211,- anggaran tersebut adalah Belanja langsung.

d. **Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka kedudukan Biro Bina Mental dan Spritual adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Biro (eselon II B), dengan membawahi 4 eselon III.

Adapaun struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2009 sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO BINA MENTAL DAN SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

A. Strategi Perencanaan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Perencanaan Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerjanya.

Perencanaan strategic merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam rencana strategik disusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 di mana setiap tahunnya dijabarkan

kembali dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan unit pelaksana.

Perencanaan Strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Menyikapi berbagai dinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Sulawesi Selatan bertekad menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui **Pendekatan Kemandirian Lokal yang bernapaskan keagamaan pada tahun 2020**, olehnya itu semua tatanan yang ada perlu menyikapi secara cermat dan bijaksana.

1. Visi dan Misi

Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan RPJPD 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk itu Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 Tahun pertama RPJMD 2013-2018 adalah :

" Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan "

Penjabaran makna dari visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Pilar Utama Pembangunan Nasional : Gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi

acuan dan kontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan, kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.

Simpul Jejaring :

Gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya.

Akselerasi Kesejahteraan :

Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu indeks pembangunan manusia berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan

ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar Rp. 30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran dibawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta sim bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian integral Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, tentunya dituntut peran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tersebut. Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang maka visi Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

“ Pemenuhan Pelayanan Administrasi, Pembinaan serta Koordinasi dalam peningkatan Kerukunan Ummat Beragama ”

Visi tersebut mengandung makna yaitu :

“ Pelayanan maksimal dalam rangka pembangunan yang agamis, agar proses pelaksanaan pembangunan senantiasa sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran agama “.

Adapun Misi Pembangunan Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2013-2018 adalah :

NO.	MISI	PENJABARAN
1.	Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama	Pencapaian puncak dari seluruh upaya pembangunan . misi ini terkait dengan pencapaian kondisi bagi pemenuhan kehidupan rohania dan spiritualitas masyarakat sebagai salah satu landasan bagi pencapaian kebahagiaan yang hakiki. Dalam upaya umum ini tercakup penciptaan dukungan bagi umat beragama, baik laki-laki maupun perempuan, bagi terpenuhinya situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan ibadah, kecukupan tempat, kapasitas penceramah agama, serta kerukunan intra dan antar umat beragama.
2.	Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan	Pencapaian kesejahteraan umum merupakan misi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya umum ini terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, perbaikan distribusi pendapatan. Ini diupayakan seiring dengan akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, pengembangan industri, pengembangan wirausaha, penanganan masalah kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Misi ini menseimbangkan antara upaya pertumbuhan kesejahteraan di satu sisi dengan pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan di sisi lainnya, serta memperhatikan

		kesempatan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan penerimaan manfaatnya.
3.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur	Untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai simpul bagi pelayanan pendidikan, kesehatan dan perhubungan di luar jawa, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tercakup didalamnya upaya untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai simpul bagi pendidikan tinggi selain semakin memantapkan partisipasi wajib belajar 12 tahun, juga upaya menjadikan Sulawesi Selatan sebagai simpul layanan kesehatan seiring dengan pengembangan layanan rumah sakit berskala internasional sambil semakin memantapkan layanan kesehatan untuk lapisan bawah dan rumah tangga miskin. Pada misi ini juga tercakup upaya untuk semakin memajukan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta sarana/prasarana transportasi di Kawasan Timur Indonesia dan luar jawa umumnya.
4.	Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	Peran pemerintah Provinsi amat urgen dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan dan memberi energi kepada daerah Kabupaten/kota untuk menghasilkan sinergi dalam mendorong pusat-pusat kemajuan. Misi ini mencakup upaya-upaya mengefektifkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota antar provinsi regional Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia, serta mendinamiskan sinergitas global dengan lembaga internasional. Selain itu misi ini juga berfokus pada upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah.
5.	Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum	Kemajuan tatanan menuju peradaban yang baik mempersyaratkan terpatuhinya norma-norma kehidupan. Ini akan beriring dengan perwujudan kesetaraan dan fairness di dalam berbagai aspek tatanan. Misi ini

		mencakup upaya-upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum, penciptaan iklim bahu persaingan usaha, serta pensubstansian demokrasi dalam tatanan. Selain itu, tercakup upaya-upaya perwujudan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6.	Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa	Perwujudan ketertiban umum dan jaminan keamanan untuk semua (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan esensi dari penyelenggaraan pembangunan. Tentu saja ini harus seiring dengan upaya untuk terus menerus memvitalkan manifestasi kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendukung perwujudan ketertiban dan ketentraman, pencegahan dan penanganan konflik sosial, pemeliharaan harmoni sosial, penegakan pilar kebangsaan dan bernegara, serta penegakan implementasi regulasi daerah
7.	Meningkatkan perwujudan Kepemerintahan yang baik dan bersih	Kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi dorongan perubahan yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Misi ini mencakup upaya-upaya pokok atas reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pengembangan sistem akuntabilitas dan transparansi, serta pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Untuk mencapai Misi Pembangunan Daerah, disusun Misi Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Selatan dalam kurun waktu 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang lembaga keagamaan, sarana mental, seni budaya serta urusan haji, pengelolaan zakat;
2. Menciptakan suasana kondusif dalam kehidupan beragama;
3. Mewujudkan keunggulan lokal seni dan budaya keagamaan;
4. Meningkatkan kualitas aparatur dalam rangka perwujudan pelayanan yang akuntabel.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
2. Melestarikan dan menggali nilai seni budaya keagamaan dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan kelembagaan dan pelayanan melalui peningkatan pendayagunaan aparatur serta akuntabilitas pengelolaan keuangan

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2013 – 2018 adalah :

1. Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama

2. Meningkatnya peranan dan fungsi Tokoh Agama dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama
3. Terwujudnya pluralisme seni budaya sebagai corak kehidupan masyarakat
4. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pelayanan aparatur yang berdaya guna serta pelaporan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

3. Strategi, kebijakan dan Program

Dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi diperlukan perumusan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun strategi Biro Bina Mental dan Spiritual adalah :

1. Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama.
2. Efektifnya pembinaan peran fungsi dan keterlibatan lembaga keagamaan dan Tokoh Agama dalam membangun suasana yang harmonis dan kondusif.
3. Peningkatan promosi wisata seni budaya keagamaan
4. Penataan organisasi dan manajemen SDM aparatur serta penyempurnaan system pelayanan dan pelaporan.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, maka pokok kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat;

2. Peningkatkan peran lembaga keagamaan serta Tokoh Agama dalam menciptakan iklim yang kondusif;
3. Menjadikan seni budaya lokal keagamaan sebagai salah satu promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur.
4. Peningkatan pelayanan aparatur serta sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Program Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD;
- 4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan;
- 5) Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Ibadah Haji;
- 6) Program Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama;
- 7) Program Pengelolaan dan Keberagaman Kekayaan dan Nilai Budaya.

B. Rencana Kinerja (Penetapan Indikator Kinerja)

1. Rencana Kinerja Tahun 2015

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 disusun Rencana Kinerja setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2015 yang merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Untuk Tahun 2015 Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan serangkaian kegiatan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan dialokasikan pada 7 (tujuh) program yang terinci dalam 38 kegiatan yaitu sebagai berikut :

I	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN BIDANG KEAGAMAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan Konsultasi Keberadaan Aliran Kepercayaan 2. Pencerahan Mental Aparatur se Sulsel 3. Pembinaan dan Konseling Mental Aparatur 4. Pembinaan dan Peningkatan Kegiatan Keagamaan 5. Safari Jum'at Pemprov. Sulsel 6. Safari Ramdhan Pemprov. Sulsel 7. Pelatihan Bagi Dai Muda 8. Temu Koordinasi Peningkatan Manajemen Masjid 9. Temu Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan dan Peningkatan Kegiatan Keagamaan
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Peningkatan Kualitas Bagi Guru Mengaji se Sulsel 11. Forum Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan 12. Lokakarya Peningkatan SDM Dalam Rangka Pengelolaan Zakat 13. Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 14. Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional 15. Peningkatan Fungsi dan Peran Forum Kerukunan Ummat Beragama

II	PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KEAGAMAAN DAN TOKOH AGAMA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Pembinaan Tokoh Ulama se Sulsel 2. Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keagamaan dan Kerjasama Sosial Kemasyarakatan 3. Koordinasi dan Konsultasi Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah 4. Serasehan Peningkatan Mental Spiritual Bagi Organisasi Pemuda Keagamaan 5. Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sarana Rumah Ibadah, Lembaga Keagamaan dan Kegiatan Kegamaan 6. Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas Peran Alim Ulama Dalam Pembangunan Daerah 7. Peningkatan Kualitas Pemuka Agama dan Mubaliq-Mubaliqah.Khatib se Sulsel 8. Seminar Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Dalam Rangka Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
III	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI DAN PELAYANAN IBADAH HAJI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan Konsultasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2. Konsolidasi Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi Haji 3. Pembinaan Calon Jamaah Haji PNS Lingkup Pemprov. Sulsel
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN KEBERAGAMAN KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temu Koordinasi dan Inventarisasi Keragaman Budaya Lokal Keagamaan 2. Observasi Budaya dan Situs Sejarah Keagamaan 3. Peningkatan Penyelenggaraan Festival Budaya Keagamaan 4. Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 5. Fasilitasi Festival Seni Qasidah Tingkat Nasional
V	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Peningkatan Jasa Sarana dan Prasarana Administrasi Kantor 2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung LPTQ Prov. Sulsel

VII	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Monitoring Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan RKA/DPA SKPD-Biro Pokok dan Perubahan 3. Penatausahaan Keuangan

2. Faktor Kunci Keberhasilan dan Asumsi

Untuk menilai pencapaian visi dan misi, maka Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan faktor-faktor keberhasilan. Faktor penentu ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa faktor lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT sebagai berikut :

- a. Terjalinnnya keterpaduan program sector dan interkoneksi antar sector yang terkait dengan bidang keagamaan mulai dari, infut, output dan mampu menciptakan suasana kondusif didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- b. Tersedianya SDM aparat yang profesional dan bermoral serta memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, sebagai upaya perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- c. Tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang memadai sesuai tingkat kebutuhan minimal organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja program utama yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

A. Realisasi Capaian Kinerja

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi tahun yang dilaporkan dengan tahun – tahun sebelumnya

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2013 – 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016
1.	Jumlah persentase konsultasi dan koordinasi peningkatan kegiatan keagamaan dalam rangka kerukunan ummat beragama	%	100	100	100	100
2.	Jumlah Pembinaan terkait dengan kesadaran hidup yang berkualitas	Kegiatan	11	14	12	7
3.	Jumlah even festival kegiatan keagamaan	Even	2	2	2	2
4.	Jumlah pembinaan dan konsultasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji	Kegiatan	2	3	3	2
5.	Jumlah peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga dan tokoh agama	Kegiatan	4	9	5	5
6.	Porsentase monitoring dan evaluasi lembaga keagamaan	%	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016
7.	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan keragaman budaya lokal keagamaan	Kegiatan	2	3	1	2
8.	Jumlah observasi budaya dan situs sejarah keagamaan	Laporan	-	1	1	-
9.	Jumlah festival seni budaya keagamaan	Event	2	2	2	2
10.	Jumlah jenis lomba yang diikuti pada festival seni qasidah tingkat provinsi dan Tingkat Nasional	jenis lomba diikuti	6	6	6	3
11.	Persentase pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan Biro Mensprit	%	100	100	100	100
12.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	4	4	4	4

B. Analisis Pencapaian Kinerja 2015

Sasaran 1				
Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah persentase konsultasi dan koordinasi peningkatan kegiatan keagamaan dalam rangka kerukunan umat beragama	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah pembinaan terkait dengan kesadaran hidup yang berkualitas	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %
3.	Jumlah event festival kegiatan keagamaan	2 event	2 event	100 %
4.	Jumlah pembinaan dan konsultasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %

1. Capaian kinerja yang diperoleh pada saat konsultasi dan koordinasi di 14 kabupaten/kota telah memperoleh data keberadaan aliran kepercayaan serta perkembangan dari pada kegiatan masyarakat yang menganut aliran kepercayaan.
2. Pembinaan terhadap kesadaran hidup yang berkualitas melalui kegiatan Pencerahan Mental Aparatur 350 orang, Pembinaan dan konseling mental aparatur dengan jumlah pengunjung 36 orang dengan dibimbing 1 orang konselor, melaksanakan kegiatan keagamaan hari besar keagamaan dan pelaksanaan zikir meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan spiritual masyarakat, melaksanakan safari jum'at dengan mengunjungi 40 mesjid setiap hari Jum'at serta melaksanakan safari ramadhan selama 1 bulan ramadhan guna menjalin silaturahmi antara pejabat pemerintah provinsi sulawesi selatan dengan masyarakat, pelatihan bagi Dai Muda sebanyak 100 orang, temu koordinasi peningkatan manajemen masjid 70 orang, pembinaan dan peningkatan kegiatan keagamaan dilaksanakan di 6 kabupaten/kota yaitu Makassar, Enrekang, Wajo, Barru, Soppeng, Jeneponto dengan melaksanakan TOT dengan melahirkan guru mengaji sebanyak 800 orang dan semakin terampil dan berkemampuan dalam membaca Al-Qur'an dengan cepat serta pemahaman Al-Qur'an yang benar dan baik, melaksanakan lokakarya peningkatan SDM dalam pengelolaan Zakat sebanyak 75 orang peserta dengan memperoleh pengetahuan manajemen pengelolaan zakat sehingga dapat memberdayakan masyarakat melalui ekonomi produktif yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, melakukan forum kerukunan umat beragama dilaksanakan

di 2 lokasi Makassar dan kabupaten Soppeng dengan dihadiri 170 orang untuk memelihara kerukunan dan pemberdayaan masyarakat guna mendorong agar kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan mengalami penguatan sehingga masyarakat semakin berdaya untuk menghadapi berbagai kecenderungan terjadinya konflik.

3. Event festival keagamaan dilaksanakan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi di Kabupaten Takalar di ikuti 24 Kabupaten/Kota dengan menghasilkan 16 Qari – Qariah terbaik untuk mewakili event STQ tingkat nasional di Jakarta, Mengikutkan 16 Qari – Qariah Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) di Tingkat Nasional dengan 7 cabang lomba yang diikuti dengan mencapai peringkat ke 6 dari 10 besar se Indonesia dengan urutan : DI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau dan **Provinsi Sulawesi Selatan**, Provinsi Papua, Maluku, DKI Jogyakarta dan Provinsi Jambi. Hasil perolehan dari Hafidz 30 Jus Juara Pertama atas nama Muh, Humaida Hatta dan Tilawah Dewasa Juara ke Dua A. Marwati.
4. Pembinaan dan Konsultasi penyelenggaraan ibadah haji dengan melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mendapatkan jumlah kepastian kouta haji provinsi sulawesi selatan yang sejak Tahun 2011 di potong 20 % dari jumlah 7.555 serta melaksanakan penyelenggaraan pelayanan embarkasi dan debarkasi haji Tahun 2015 dengan jumlah kouta haji Sulawesi Selatan yang didapat sebanyak 5.777 orang.

Sasaran 2				
Meningkatnya peran dan fungsi Tokoh Agama dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga keagamaan dan tokoh agama	5 kegiatan	5 Kegiatan	100 %
2.	Persentase monitoring dan evaluasi lembaga keagamaan	100 %	100 %	100 %

1. Peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga keagamaan dan tokoh agama sebanyak 150 orang dengan melahirkan persamaan persepsi menghadapi radikalisme dan terorisme di Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, melaksanakan kegiatan serasehan peningkatan mental spiritual bagi organisasi pemuda keagamaan dengan melaksanakan konvensi pendeta gereja sebanyak 275 pendeta se Indonesia dengan menghasilkan komitmen dan menetapkan visi dan misi dalam pelayanan kehidupan bergeraja, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas peran alim ulama dalam pembangunan daerah sebanyak 100 orang dan peningkatan kualitas pemuka agama dan mubaliq-mubaliqah sebanyak 75 orang dengan mencapai hasil kinerja menambah pengetahuan dan wawasan dalam persamaan persepsi dalam mensyiarkan ajaran agama yang benar dan menjaga kerukunan antara ummat beragama sehingga pembangunan daerah di Sulawesi selatan dalam keadaan yang kondusif dan harmonis dan Seminar pemberdayaan lembaga keagamaan sebanyak 220 orang dilaksanakan di 2 lokasi Makassar dan Pare-Pare dengan mencapai persepsi yang sama dalam membangun lembaga keagamaan

dengan membuat program peningkatan kerohanian di semua elemen serta pemantapan ekonomi Jemaat.

2. Monitoring evaluasi Lembaga keagamaan di 14 Kabupaten/Kota sesuai dengan target telah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota dengan mendapatkan data lembaga keagamaan sebanyak 325 lembaga keagamaan namun yang masih berjalan dan terakomodir oleh pemerintah daerah setempat sebanyak 294 (90,46 %) lembaga keagamaan

Sasaran 3				
Terwujudnya pluralisme seni budaya sebagai corak kehidupan masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan keragaman budaya lokal keagamaan	1 kegiatan	1 Kegiatan	100 %
2.	Jumlah observasi budaya dan situs sejarah keagamaan	1 laporan	1 laporan	100 %
3.	Jumlah festival seni budaya keagamaan	2 event	2 event	100 %
4.	Jumlah jenis lomba yang diikuti pada festival seni qasidah Tingkat Nasional	6 jenis lomba diikuti	6 jenis lomba diikuti	100 %

1. Pengembangan keragaman budaya lokal keagamaan diikuti 40 orang penggiat budaya dengan mempersatukan persamaan persepsi dalam mengembangkan budaya lokal keagamaan di sulawesi Selatan
2. Observasi budaya dan situs sejarah keagamaan melibatkan 3 orang dari akademisi dan 5 orang pemerintah Kabupaten/kota dengan melihat budaya suku tengger dimana budaya suku tengger dalam berkehidupan selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya , proses interaksi antara manusia dan lingkungan, manusia sebagai mahluk yang berakal sadar sehingga kerukunan

masyarakat sangat kuat saling membantu dan bergotong royong didalam melakukan ritual sesembahan, implementasi dari observasi Pemerintah Sinjai melaksanakan Festival Karampuang di kampung adat untuk melestarikan budaya karampuang sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat tengger yang mempunyai kampung adat.

3. Festival seni budaya keagamaan di TMII Jakarta dibawakan oleh Remaja Pemuda Keagamaan sebanyak 7 orang menampilkan budaya keagamaan daerah Tana Toraja dengan memperoleh penampilan terbaik yang diikuti 13 Provinsi dan Festival Maulid Nusantara ke 9 di Jakarta menampilkan tarian khas Sulawesi Selatan yang menceritakan Maulid/Barasanji di Sulawesi Selatan dan mendapatkan 5 besar dari 20 Provinsi yang ikut.
4. Festival seni qasidah tingkat nasional ke 20 dilaksanakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan mengikuti 6 jenis lomba dan Sulawesi Selatan mendapat peringkat 5 besar dari 30 provinsi yang mengikuti festiva seni qasidah yaitu Juara I Bintang Vokalis Dewasa Putra Hasbi Sutomo, Juara III Bintang Vokalis Anak-anak Putri atas nama Putri Amalia dan Juara Harapan III Kategori Grop Qasidah Klasik Dewasa Putra diwakili dari Kabupaten Luwu Utara.

Sasaran 4				
Terwujudnya kelembagaan dan tatalaksana pelayanan aparatur yang berdaya guna serta pelaporan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan Biro Mensprit	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Biro Mensprit	4 dokumen	4 dokumen	100 %

1. Pengelolaan pelayanan administrasi kerumah tanggaan menjadi salah satu urat nadi dalam pelaksanaan tupoksi. Pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan diyakini mendorong pegawai untuk lebih meningkatnya kinerja, menimbulkan rasa saling percaya dan mempererat silaturahmi serta mewujudkan tertib administrasi sehingga menimbulkan kinerja yang nyaman dan baik.

Tahun 2015 jumlah pegawai 37 orang dan telah terlayani kenaikan pangkat sebanyak 6 orang dari 7 orang yang telah ditarget dan 12 orang terlayani kenaikan gaji berkala (KGB) sesuai dengan target yang direncanakan dan tersedianya daftar Urutan Kepangkatan (DUK) PNS, Cuti PNS 4 orang, sehingga kepuasan atas pelayanan pegawai dapat diterima.

2. Dokumen perencanaan dan pelaporan dapat diselesaikan secara keseluruhan sehingga capaian kinerja 100 % sesuai target yang diinginkan.

Dokumen tersebut adalah Awal RKPD, RKPD perubahan 2015, Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan, LAKIP dan Laporan evaluasi.

Kendala/hambatan yang dihadapi

1. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan pihak serta sistem monitoring dan evaluasi di bidang keagamaan
2. Terbatasnya data yang akurat dan komprehensif yang mengakibatkan sulitnya untuk mengukur serta membandingkan antara pencapaian sasaran dengan pencapaian kinerja keseluruhan.

Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi di bidang keagamaan
2. Peningkatan penataan pengembangan informasi bidang keagamaan yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat untuk menyusun program dan rencana pembinaan serta berfungsinya sebagai sumber informasi yang efektif dan efisien.

C. Analisis Keuangan

No	Program	Anggaran			% Fisik	Keterangan
		Rencana	Realisasi	% Keuangan		
1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan	2.898.875.000	2.852.048.448	98,38	100	
2.	Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama	788.015.000	776.800.900	98,58	100	
3.	Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Ibadah Haji	479.000.000	476.518.900	95,88	100	
4.	Pengelolaan dan Keberagaman Kekayaan dan Nilai Budaya	713.100.000	705.297.300	98,91	100	
5.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.057.128.211	1.018.225.694	96,32	100	

No	Program	Anggaran			% Fisik	Keterangan
		Rencana	Realisasi	% Keuangan		
6.	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	265.000.000	247.081.650	93,24	100	
7.	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja	323.140.000	320.412.500	99,16	100	

D.Aspek Keuangan

Sumber pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Spiritual adalah bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Belanja

Pada Belanja Langsung pada Tahun 2015 sebesar Rp. 6.542.258.211,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.396.385.392,- atau sebesar 97,77 %.

2. Pendapatan

Pada Pos Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RKPD Gedung LPTQ) yang terletak di Jalan Talasalapang Makassar yang direncanakan adalah sebagai berikut :

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
2012	35.000.000,-	40.400.000,-	115,42 %
2013	50.000.000,-	29.650.000,-	59,30 %
2014	50.000.000,-	33.400.000,-	66,8 %
2015	50.000.000,-	50.350.000,-	100,70 %

Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan :

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 meskipun telah menunjukkan pencapaian sasaran yang memadai namun masih ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan yang dimaksud antara lain :

1. Penetapan target indicator kinerja sasaran tahun 2015 belum optimal dan masih lebih bersifat output dari pada outcome, sehingga dari hasil pengukuran pencapaian indicator kinerja sasaran belum memperlihatkan berfungsinya kegiatan pembinaan yang diterima oleh penerima layanan meskipun pada kenyataannya bahwa output telah bekerja.
2. Terbatasnya data yang akurat dan komprehensif yang mengakibatkan sulitnya untuk mengukur serta membandingkan antara pencapaian sasaran dengan pencapaian kinerja keseluruhan dibidang keagamaan di Sulawesi Selatan.

Pemecahan Masalah :

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Spiritual tahun 2015 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pemecahan masalah yang dapat ditempuh antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/Kota termasuk

- dengan lembaga lembaga keagamaan dan tokoh agama serta meningkatkan sinergitas pembinaan antara perangkat pelaksana dan penerima layanan pembinaan.
2. Peningkatan Penataan pengembangan informasi bidang keagamaan yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat untuk menyusun program dan rencana pembinaan serta berfungsinya sebagai sumber informasi yang efisien dan efektif.
 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan maupun pembelajaran organisasi.

Permasalahan Pendapatan Asli Daerah :

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 sebesar Rp. 50.350.000,- atau 100,70 % dari target penerimaan PAD sebesar Rp. 50.000.000,- mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya, sehingga perlunya penambahan sarana prasarana gedung LPTQ agar minat masyarakat yang akan menggunakan semakin bertambah, untuk dapat lebih meningkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemecahan Masalah :

1. Sarana dan Prasarana gedung LPTQ ditingkatkan antara lain : tempat tidur, kursi, dan AC.
2. Penambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan.

BAB IV

PENUTUP

Tinjauan Umum

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah, Biro Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari rangkaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi, misi Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT). Pengukuran Kinerja Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2015.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2015 dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada lingkup Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 20 Januari 2016

**Kepala Biro Bina Mental Dan Spiritual
Setda Prov.Sulsel,**

Drs. MUSAFFAR SYAH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19590107 198603 1 010

